



## INDONESIA DI TENGAH PENINGKATAN KETEGANGAN DI LAUT CHINA SELATAN

Rizki Roza\*)

### Abstrak

*Mahkamah Arbitrase Internasional akan mengeluarkan putusannya terkait gugatan Filipina atas persoalan Laut China Selatan. China yang sejak awal menolak persoalan ini ditangani lembaga internasional, menyatakan akan mengabaikan apapun putusan yang dihasilkan. Sikap China ini menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang bersengketa dan negara lainnya yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut. Militerisasi kawasan sengketa semakin meningkat. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan menyusun respons yang tepat mengingat Indonesia juga menyimpan potensi konflik di sekitar wilayah sengketa.*

### Pendahuluan

Perkembangan dalam beberapa pekan terakhir mengenai persoalan sengketa tumpang tindih klaim atas wilayah Laut China Selatan (LCS) kembali menunjukkan terjadinya peningkatan ketegangan. Kondisi ini terutama terkait putusan yang akan dikeluarkan *The Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Arbitrase Internasional/MAI) dalam beberapa pekan mendatang. Sejumlah negara mengkhawatirkan sikap China yang sudah menyatakan menolak terhadap apapun putusan MAI atas gugatan unilateral Filipina. Penolakan China tersebut diikuti pula dengan peningkatan kehadirannya di kawasan sengketa yang direspons dengan tindakan serupa oleh negara lain. Sekalipun bukan bagian dari negara yang bersengketa,

Indonesia harus mencermati perkembangan ini dengan seksama. Apakah Indonesia juga harus khawatir pada peningkatan ketegangan di LCS? Bagaimana semestinya respons yang diberikan Indonesia terhadap perkembangan tersebut? Tulisan singkat ini akan memberikan gambaran agar dapat memahami kekhawatiran yang sedang berkembang di kawasan dan dapat menjadi pertimbangan bagaimana respons yang perlu diambil Indonesia.

### Gugatan Filipina

Merasa semua jalur diplomatik yang digunakan untuk mencari solusi damai sejak 1995 belum memberikan hasil, pada 2013 Pemerintah Filipina memutuskan untuk mengajukan Beijing ke sebuah panel

\*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: rizki.roza@dpr.go.id



arbitrase internasional sesuai UNCLOS 1982. Filipina berusaha meminta PBB menyatakan bahwa klaim China atas sebagian kawasan LCS adalah ilegal. China menolak langkah Filipina tersebut, dan bertahan pada pendiriannya untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa negara secara bilateral tanpa melibatkan mediasi internasional.

MAI kemudian menerima gugatan Filipina pada Oktober 2015 lalu. Keputusan tersebut menggugurkan upaya China yang menuntut kasus ini tidak ditangani lembaga internasional. Dalam pandangan China, tindakan MAI menerima gugatan unilateral Filipina hanya akan memperkeruh suasana, meningkatkan ketegangan di antara kedua negara, mengganggu stabilitas kawasan dan tatanan maritim internasional, serta bertentangan dengan upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Putusan yang akan dihasilkan MAI tidak hanya penting bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi banyak negara lainnya di luar kawasan sengketa. Hal ini terutama terkait sembilan garis putus-putus yang tidak memiliki koordinat yang jelas. Meskipun telah mempertahankan klaimnya sejak lama, namun Beijing tidak pernah memberikan kejelasan mengenai sembilan garis putus-putus tersebut.

Indonesia termasuk negara yang berkepentingan terhadap hasil putusan MAI dan mendukung langkah Filipina ke MAI. Pemerintah Indonesia mengirimkan peninjau untuk mengikuti secara seksama seluruh proses arbitrase. Menurut Arif Havas Oegroseno, apapun putusan MAI terhadap gugatan Filipina akan mempermudah negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982. Putusan MAI dapat menjadi yurisprudensi dalam proses perundingan perbatasan laut antar-bangsa yang biasanya melibatkan pulau-pulau kecil, karang, atau benda laut lainnya. Putusan yang akan dikeluarkan oleh MAI diyakini akan menentukan siapa negara paling berhak atas 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Spratly, tempat China dan Filipina mengklaim mempunyai hak ZEE di perairan tersebut. Jika putusan MAI menegaskan bahwa pulau-pulau buatan tidak memiliki ZEE maka China tidak memiliki landasan hukum untuk mengklaim ZEE atas tujuh

pulau reklamasinya di dekat Kepulauan Spratly. Klaim China atas sebagian besar wilayah LCS melalui sembilan garis putus-putus pun akan semakin lemah. Hal ini lah yang dihindari China sejak awal dan kini membuat mereka merasa dipojokkan sehingga bereaksi keras dengan meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa.

## Kekhawatiran menjelang Putusan MAI

Sikap China yang menolak untuk mengakui apapun putusan MAI menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Persoalan ini menjadi pembicaraan di berbagai forum internasional, di antaranya menjadi salah satu agenda pembahasan KTT G-7. Beijing kemudian menyampaikan keberatannya atas pembahasan persoalan LCS di forum G-7 dengan berpandangan bahwa tidak semestinya forum tersebut membahas sesuatu yang bukan “urusannya”. Kekhawatiran juga mengemuka dalam pertemuan Shangri-La Dialogue, beberapa waktu lalu di Singapura. Pada forum itu Menteri Pertahanan India misalnya, mengatakan bahwa penolakan China atas arbitrase dengan dalih mengharapkan dialog bilateral hanyalah taktik guna memuluskan kepentingan ekonomi China untuk mengurangi ketegangan di LCS.

Kekhawatiran yang berkembang tidak dapat dipisahkan dari proyek reklamasi yang dilakukan China sejak 18 bulan lalu di wilayah sengketa. Pulau-pulau buatan tersebut yang sebelumnya hanya berupa gugusan karang yang tidak dapat dihuni, kini dilengkapi banyak infrastruktur yang mencakup dermaga, pos penjagaan, bahkan memiliki landasan udara yang mampu menampung pesawat-pesawat militer. Pendaratan pesawat militer di salah satu pulau buaatannya dilakukan pertama kali pada April lalu. Tindakan itu langsung memicu perdebatan di kawasan. Selain itu, pada bulan Mei, sebuah biro pemerintahan China juga menyampaikan rencana untuk menempatkan satu pangkalan kapal penyelamat di Kepulauan Spratly. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai upaya Beijing untuk memperkuat kehadirannya di wilayah sengketa. Washington bahkan menuduh China telah menempatkan rudal permukaan ke udara di salah satu pulau.

Salah satu tindakan militerisasi yang juga dikhawatirkan banyak pihak adalah penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di LCS, sebagaimana yang dilakukan China di Laut China Timur (LCT) pada 2013 lalu. Jika hal itu terjadi di LCS maka jelas akan meningkatkan ketegangan regional. Setidaknya Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyatakan tidak akan mengakui pernyataan apapun mengenai zona pertahanan udara China atas LCS. Kementerian Pertahanan Taiwan sudah menyampaikan kepada parlemennya mengenai rencana penguatan militer di wilayah sengketa.

Sementara Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara menuding China melakukan militerisasi wilayah sengketa, demikian pula sebaliknya China menganggap peningkatan patroli dan pelatihan militer yang dilakukan AS di perairan sengketa sebagai aksi militerisasi. Pada Mei lalu, AS kembali mengirimkan kapal perang USS William P. Lawrence untuk melakukan patroli di kawasan LCS. Tindakan ini memicu kemarahan China karena kapal tersebut berlayar hingga jarak 12 mil laut dari kepulauan Fierly Cross yang diklaim China. Bagi AS, patroli yang dilakukannya merupakan tindakan perlindungan terhadap kebebasan pelayaran, sementara bagi China patroli Angkatan Laut AS di dekat pulau-pulau miliknya di LCS merupakan tindakan provokatif.

Perkembangan lain yang juga tidak dapat diabaikan adalah keputusan Washington untuk mencabut seluruh embargo penjualan senjata mematikan terhadap Vietnam. Vietnam sebenarnya sudah sejak lama meminta pencabutan embargo, namun Washington selalu menolak dan menggunakannya untuk menekan Vietnam agar menegakkan HAM di negara tersebut. Tekanan yang terus menerus dihadapi Vietnam terkait sengketa LCS, tampaknya menjadi pertimbangan Presiden Obama untuk mencabut embargo dan membantu Vietnam membangun kekuatan untuk mempertahankan diri. Pasca-pencabutan embargo, Vietnam dikabarkan tengah berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan maritimnya dengan berencana membeli F-16 Fighting Falcon dan pesawat patroli maritim P-3 Orion.

## Indonesia di tengah Peningkatan Ketegangan

Indonesia bukan bagian dari negara-negara yang bersengketa di LCS. Dalam berbagai kesempatan, Beijing telah menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki masalah mengenai kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna dan perairan di sekitar kepulauan tersebut yang berdekatan dengan wilayah LCS yang diklaim China. Namun kondisi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai pernyataan Beijing tersebut. Indonesia dan China sudah beberapa kali mengalami ketegangan di sekitar perairan Natuna, terutama terkait persoalan wilayah penangkapan ikan.

Ketegangan yang terjadi pada Maret lalu antara Indonesia dan China misalnya, cukup mengkhawatirkan. Ketegangan itu dipicu oleh aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna. Kapal penjaga pantai China mengganggu penegakan hukum di laut yang sedang dilakukan kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP Hiu 11. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno L.P.Marsudi, memanggil Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta dan menyampaikan nota protes. Dalam nota protes tersebut ditekankan tiga kesalahan yang dilakukan kapal penjaga pantai China, yaitu kapal penjaga pantai melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia; melanggar penegakan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia; dan melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia. Sikap Indonesia tersebut direspons Kementerian Luar Negeri China dengan bantahan bahwa kapal penjaga pantainya tidak memasuki wilayah perairan Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa kapal penjaga pantai datang untuk menyelamatkan kapal nelayan China, KM Kway Fey 10078 yang diserang kapal bersenjata Indonesia. Menurutnya, kapal nelayan China tersebut hanya melakukan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa di tempat yang telah turun-temurun dikunjungi.

Selanjutnya China kembali menyampaikan protes pada Mei 2016 untuk menyikapi penangkapan kapal nelayan China Gu Bei Yu 27088 oleh KRI Oswald

Siahaan-354 yang diduga kuat sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Penangkapan itu direspons dengan protes keras dari Kementerian Luar Negeri China. Mereka berpandangan bahwa kapal tersebut beroperasi secara sah di wilayah yang sah juga.

Dua insiden tersebut semestinya sudah cukup untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa kedua negara juga menyimpan potensi-potensi konflik di perairan sekitar wilayah LCS yang dipersengketakan sejumlah negara. Ketegangan yang berkembang di kawasan LCS sangat mungkin akan memicu terjadinya kembali insiden-insiden serupa antara Indonesia dan China. China yang sedang merasa terpojok menjelang keluarnya putusan MAI, tampaknya telah mendorong China untuk meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa. Sementara di sisi lain, Indonesia juga sedang berusaha meningkatkan kehadiran kapal-kapal patroli untuk mencegah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Kondisi inilah yang mengharuskan Indonesia untuk berhati-hati dalam menyeimbangkan upayanya menjaga kekayaan laut dan kedaulatan territorial dengan menjaga stabilitas kawasan.

## Penutup

Persoalan LCS telah menjadi sumber ketegangan di kawasan selama beberapa dekade terakhir, tidak hanya antara negara-negara yang bersengketa tetapi juga dengan negara lainnya yang memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut. Ketegangan yang awalnya hanya antara China dan Filipina akibat gugatan yang diajukan Filipina ke MAI, nyatanya saat ini meluas karena China yang merasa semakin terpojok menjelang keluarnya putusan MAI. Kondisi ini mendorong China untuk meningkatkan kehadiran kekuatannya di wilayah sengketa dan direspons pula dengan tindakan serupa oleh sejumlah negara.

Meskipun Indonesia bukan bagian dari negara yang bersengketa, beberapa insiden yang terjadi belakangan ini semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia bahwa Indonesia dan China juga menyimpan potensi konflik yang membutuhkan penyelesaian di sekitar

perairan Kepulauan Natuna. Kondisi ini menjadikan sikap Indonesia yang secara konsisten mendorong negara-negara yang bersengketa untuk menahan diri dan mengedepankan cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa, menjadi tidak cukup memadai. Indonesia juga perlu meningkatkan kehadiran patroli pengawasan di wilayah perairan yang sering kali terjadi pelanggaran kedaulatan. Peran Parlemen menjadi sangat penting untuk memastikan terlaksananya patroli pengawasan di wilayah perairan, karena keterbatasan anggaran selama ini selalu menjadi penghambat aparat Indonesia untuk melaksanakan patroli pengawasan di perairan perbatasan Indonesia.

## Referensi

- “Beijing Bantah Kapal Penjaga Pantai China Masuk Wilayah RI”, <http://internasional.kompas.com/read/2016/03/21/21313861/Beijing.Bantah.Kapal.Penjaga.Pantai.China.Masuk.Wilayah.RI>, diakses 7 Juni 2016.
- “Beijing Memprotes Indonesia atas Penangkapan 8 Nelayan China di Natuna”, <http://internasional.kompas.com/read/2016/05/31/09463021/beijing.memprotes.indonesia.atas.penangkapan.8.nelayan.china.di.natuna>, diakses 7 Juni 2016.
- “Indonesia Dukung Filipina Gugat China di Arbitrase Internasional”, <http://www.merdeka.com/dunia/indonesia-dukung-filipina-gugat-china-di-arbitrase-internasional.html>, diakses 7 Juni 2016.
- “Koarmabar Sergap Kapal Nelayan China di Perairan Natuna”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/28/20234741/koarmabar.sergap.kapal.nelayan.china.di.perairan.natuna>, diakses 7 Juni 2016.
- “Taiwan Tidak Akan Akui Zona Pertahanan Udara China”, <http://www.antaraneews.com/berita/565556/taiwan-tidak-akan-akui-zona-pertahanan-udara-china> diakses 7 Juni 2016.
- “Vietnam Boleh Membeli F-16 dan P-3 Orion dari Amerika Serikat”, <http://www.antaraneews.com/berita/563393/vietnam-boleh-membeli-f-16-dan-p-3-orion-dari-amerika-serikat>, diakses 7 Juni 2016.